



Warga Miskin Dapat Bantuan Hukum

■ Eksekutif Perbarui Perjanjian Kerja Sama Dengan 22 OBH

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta memastikan warga miskin di wilayahnya tetap dapat mengakses bantuan hukum secara gratis pada 2023 ini. Secara resmi eksekutif telah memperbarui perjanjian kerja sama dengan sedikitnya 22 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang berasal dari DIY.

Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Aman Yuri-adjaya, menyampaikan dengan perpanjangan tersebut, maka perjanjian ini sudah memasuki tahun ke dua per 2023. Ia pun menyebut, Pemkot menempuh perpanjangan kerja sama karena melihat manfaat secara langsung bagi warga miskin yang membutuhkan bantuan hukum.

"Ini menjadi bukti hadirnya pemerintah di masyarakat. Khususnya, untuk membantu layanan bantuan hukum ke masyarakat miskin," urainya, Selasa (16/1).

Terlebih, layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin telah diamankan Perda Kota Yogyakarta No 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Kemudian, diperkuat oleh Perwal No 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta No 3 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Tahun lalu total ada 32 perkara baik litigasi maupun non litigasi, yang dapat bantuan hukum, dengan total serapan anggaran Rp106 juta. Kebijakan ini mengantar Kota Yogyakarta menda-

PELAYANAN PUBLIK

- Pemkot memastikan warga miskin dapat mengakses bantuan hukum secara gratis pada 2023.
- Eksekutif jalan kerja sama dengan 22 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang berasal dari DIY.
- Kebijakan ini menjadi bukti hadirnya pemerintah di masyarakat. Khususnya, untuk membantu layanan bantuan hukum ke masyarakat miskin.
- Tahun 2022 total ada 32 perkara yang diselesaikan dengan total serapan anggaran Rp106 juta.

patkan predikat kota peduli HAM dengan nilai tertinggi di DIY," ucap Aman.

Untuk tahun ini, Pemkot tetap ada perbaikan dalam skema kerja sama, sesuai masukan dan catatan yang diterima. "Semoga, perbaikan itu bisa membuat layanan hukum ini semakin optimal," imbuhnya.

Salah satu perbaikan yang ditempuh adalah, dengan menggulirkan penandatanganan kesepakatan perjanjian kerja sama di awal tahun, sehingga masyarakat miskin dapat mengakses layanan secara penuh di sepanjang 2023. Adapun 22 OBH yang digandeng, seluruhnya dipastikan telah mengantongi akreditasi resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian

Hukum dan HAM.

"Setiap OBH memperoleh anggaran untuk memberikan layanan bantuan hukum Rp12 juta, untuk kebutuhan litigasi dan non litigasi. Tapi, layanan ini hanya bisa diakses khusus masyarakat miskin," ujarnya.

Oleh sebab itu, Aman pun meminta seluruh OBH yang secara resmi menjadi mitra Pemkot Yogya agar cermat memantau data penduduk miskin yang menjadi syarat mutlak untuk mengakses layanan tersebut. Dengan begitu, anggaran yang sudah dialokasikan jajaran eksekutif pun kemanfaatannya bisa tepat sasaran.

"Sebisanya mungkin seluruh kegiatan yang dijalankan juga dipublikasikan, supaya masyarakat bisa mengerti, bahwa di Kota Yogyakarta ada layanan bantuan hukum yang dapat diakses," ungkap Sekda.

Sementara, Direktur Rumah Bantuan Hukum Yayasan Alfa (RBH YAFTA), Kharis Mudzakir, mengungkapkan, pihaknya siap melanjutkan kemitraan pelaksanaan bantuan hukum bagi warga miskin di Kota Yogyakarta. Sehingga, kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan kedudukan di hadapan hukum pun bakal dikawalinya kembali di sepanjang 2023 nanti.

"Secara teknis sudah didasari dengan penandatanganan perjanjian kerjasama. Kami berharap, kerja sama yang terjalin di 2023 ini akan terrealisasikan lebih baik dari tahun sebelumnya," pungkas Kharis. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Juli 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005